

Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa: Kajian Literatur dalam Perspektif Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Agnes Nainggolan¹, Elsa Sianturi², Lora Aruan³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: agnesnainggolan2007@gmail.com

Abstract

Indonesian Unity is a fundamental value of Pancasila that plays a significant role in maintaining national integration amid social diversity. However, political polarization, economic inequality, and sociocultural conflicts present challenges that may threaten national unity. This study aims to analyze the role of Indonesian Unity values in preventing national disintegration from political, economic, and sociocultural perspectives. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant scientific journal articles and academic publications. Data were analyzed using content analysis through identifying, categorizing, comparing, and synthesizing findings from previous studies. The findings indicate that Indonesian Unity values contribute to strengthening national integration through three main dimensions. In the political dimension, these values encourage inclusive democracy, respect for differing political perspectives, and peaceful conflict resolution. In the economic dimension, they support equitable development, social justice, and efforts to reduce socioeconomic disparities. Meanwhile, in the sociocultural dimension, Indonesian Unity values promote tolerance, solidarity, and respect for diversity. This study concludes that preventing national disintegration requires the integrated application of Indonesian Unity values through equitable government policies, citizenship education, and active public participation. Strengthening these three dimensions can contribute to developing inclusive and sustainable national integration.

Keywords: Indonesian Unity, national disintegration, national integration, Pancasila, literature review.

Abstrak

Persatuan Indonesia merupakan nilai fundamental dalam Pancasila yang berperan dalam menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat. Namun, perkembangan polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial budaya menjadi tantangan yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai Persatuan Indonesia dalam mencegah disintegrasi bangsa melalui perspektif politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) melalui penelaahan artikel jurnal dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menyintesis temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia memiliki peran dalam memperkuat integrasi nasional melalui tiga aspek utama. Dalam bidang politik, nilai persatuan mendorong demokrasi yang inklusif,

toleransi terhadap perbedaan pandangan, dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam bidang ekonomi, nilai persatuan berkaitan dengan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan pengurangan kesenjangan kesejahteraan. Sementara itu, dalam bidang sosial budaya, nilai persatuan memperkuat toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan disintegrasi bangsa membutuhkan penerapan nilai Persatuan Indonesia secara terpadu melalui kebijakan pemerintah yang berkeadilan, pendidikan kewarganegaraan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penguatan ketiga aspek tersebut dapat mendukung terbentuknya integrasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Persatuan Indonesia, disintegrasi bangsa, integrasi nasional, Pancasila, studi literatur.

Pendahuluan

Persatuan Indonesia merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Nilai persatuan memiliki kedudukan strategis sebagai landasan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan kepentingan masyarakat. Sebagai negara yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya, Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok tanpa menghilangkan identitas setiap komunitas. Lukito et al. (2022) menjelaskan bahwa Pancasila berperan sebagai faktor pemersatu yang menghubungkan berbagai identitas masyarakat dalam satu kerangka kebangsaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persatuan nasional tidak mengharuskan masyarakat memiliki keseragaman identitas, tetapi menuntut adanya kesepakatan mengenai nilai bersama yang menjadi dasar kehidupan bernegara. Ridhoh et al. (2026) juga menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan ideologis untuk menghadapi pertentangan identitas melalui penguatan keadilan sosial, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, nilai Persatuan Indonesia perlu dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan hubungan antarkelompok sekaligus menjadi dasar untuk mencegah berbagai bentuk perpecahan bangsa.

Ancaman disintegrasi bangsa merupakan persoalan yang berkaitan dengan melemahnya hubungan sosial, menurunnya kepercayaan antarkelompok, serta berkembangnya pertentangan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Disintegrasi tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi dapat diawali oleh meningkatnya prasangka sosial, ketidakpuasan terhadap kebijakan, dan menguatnya identitas kelompok yang bersifat eksklusif. Dalam perspektif politik, perkembangan demokrasi dan desentralisasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, proses tersebut juga menghadirkan tantangan ketika persaingan politik tidak disertai pengelolaan keberagaman yang adil. Fitriani et al. (2005) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom di Indonesia berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk keberagaman etnis, kepentingan politik, kondisi geografis, dan sumber daya ekonomi. Sementara itu, Diprose (2008) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap dinamika konflik, termasuk meningkatnya ketegangan akibat persaingan kekuasaan di tingkat lokal. Kedua

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu memperhatikan hubungan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional agar perbedaan aspirasi tidak berkembang menjadi pertentangan yang mengganggu persatuan.

Dalam bidang politik, penguatan nilai Persatuan Indonesia menghadapi tantangan berupa polarisasi masyarakat, politik identitas, dan perbedaan preferensi politik yang semakin tajam. Demokrasi memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menentukan pilihan politik, tetapi perbedaan tersebut dapat memunculkan konflik sosial apabila masyarakat memandang kelompok yang memiliki pilihan berbeda sebagai pihak yang harus dimusuhi. Jati (2022) menemukan bahwa polarisasi masyarakat Indonesia dalam periode 2014 sampai 2020 berkaitan dengan semakin kuatnya penggunaan identitas dalam persaingan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik dapat berkembang menjadi persoalan hubungan sosial ketika persaingan tidak lagi berfokus pada gagasan dan kebijakan. Istania (2021) juga mengkaji persaingan kelompok etnis dalam pembentukan provinsi baru pada konteks desentralisasi Indonesia, yang memperlihatkan keterkaitan antara identitas kelompok dan perebutan pengaruh politik. Oleh karena itu, nilai Persatuan Indonesia perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan pandangan, penguatan dialog demokratis, dan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip konstitusional. Persatuan dalam kehidupan politik bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat, melainkan memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak merusak hak kewarganegaraan dan hubungan antarmasyarakat.

Selain persoalan politik, ketimpangan ekonomi merupakan faktor struktural yang perlu diperhatikan dalam upaya mempertahankan integrasi nasional. Perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pelayanan publik dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama apabila masyarakat menilai bahwa pembangunan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok atau wilayah tertentu. Muhtadi dan Warburton (2020) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia mengenai ketimpangan pendapatan memiliki hubungan dengan preferensi politik dan sikap terhadap demokrasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari dinamika politik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Karimi (2024) menekankan bahwa sistem ekonomi Pancasila mengutamakan prinsip keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan dalam pengelolaan pembangunan nasional. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, nilai Persatuan Indonesia dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang adil dapat memperkuat rasa memiliki terhadap negara karena masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Persatuan nasional dalam bidang ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan negara membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan berpotensi mempertahankan kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Budimanta (2024) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila menempatkan keseimbangan sosial, keadilan, dan kemakmuran bersama sebagai

prinsip dalam mengarahkan kegiatan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Tamba et al. (2024) menegaskan bahwa nilai Pancasila memiliki relevansi dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, Sugiyanto (2024) menguraikan pentingnya prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil karena pelaku usaha memiliki kondisi dan kebutuhan yang beragam. Ketiga kajian tersebut memberikan dasar konseptual bahwa penguatan persatuan melalui pembangunan ekonomi memerlukan distribusi kesempatan yang adil, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan perhatian terhadap kesenjangan struktural.

Dalam perspektif sosial budaya, keberagaman masyarakat Indonesia merupakan karakteristik kebangsaan yang memerlukan pengelolaan secara inklusif. Perbedaan agama, bahasa, adat istiadat, serta kebiasaan sosial dapat memperkaya kehidupan nasional melalui interaksi dan pertukaran budaya. Namun, keberagaman juga dapat menghadirkan ketegangan ketika masyarakat mengembangkan stereotip, prasangka, atau pandangan yang menempatkan identitas kelompok sendiri sebagai identitas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Hidir dan Nurdiyanti (2024) menjelaskan bahwa nilai filosofis Pancasila memiliki kontribusi terhadap pembentukan kesadaran identitas sosial dan nasional dalam masyarakat yang beragam. Persatuan nasional perlu dibangun melalui pengakuan terhadap identitas budaya serta penguatan nilai yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Dwintari dan Murdiono (2023) juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mengintegrasikan nilai toleransi melalui kegiatan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, upaya pencegahan disintegrasi dalam bidang sosial budaya tidak cukup hanya mengandalkan seruan untuk menjaga persatuan, tetapi membutuhkan proses pendidikan dan interaksi sosial yang membentuk sikap saling menghormati secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi turut memberikan tantangan baru terhadap penguatan identitas nasional dan nilai persatuan masyarakat. Teknologi komunikasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok secara lebih luas. Di sisi lain, ruang digital juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi keliru, prasangka, dan narasi yang mempertajam perbedaan identitas. Huda dan Aji (2026) menjelaskan bahwa perkembangan globalisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan terhadap internalisasi nilai Pancasila, terutama melalui penyebaran misinformasi, perubahan pola interaksi sosial, dan pengaruh nilai dari luar. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas nasional melalui literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, penerapan nilai Persatuan Indonesia membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menilai informasi secara kritis, menghormati perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran konten yang mendorong permusuhan antarkelompok. Penguatan literasi kewarganegaraan digital menjadi relevan karena interaksi sosial masyarakat berlangsung dalam ruang fisik sekaligus ruang digital.

Upaya mempertahankan persatuan nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan publik dan kelembagaan negara. Nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan. Arifin (2024) menjelaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila berkaitan dengan politik hukum dan pengaturan kelembagaan negara, termasuk tantangan dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan ideologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai persatuan memerlukan keterkaitan antara pendidikan nilai, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kewarganegaraan secara setara, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun toleransi, solidaritas, dan kerja sama sosial. Dengan demikian, pencegahan disintegrasi memerlukan pendekatan yang menghubungkan dimensi kelembagaan dan perilaku sosial agar nilai persatuan tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi memiliki relevansi terhadap penyelesaian persoalan kehidupan berbangsa.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara Pancasila, integrasi nasional, dan tantangan keberagaman melalui sudut pandang yang berbeda. Lukito et al. (2022) menekankan hubungan Pancasila dengan identitas negara, sedangkan Jati (2022) mengkaji polarisasi politik dan dampaknya terhadap demokrasi. Muhtadi dan Warburton (2020) memusatkan perhatian pada persepsi ketimpangan ekonomi dan dukungan terhadap demokrasi, sementara Dwintari dan Murdiono (2023) membahas penguatan toleransi melalui pendidikan kewarganegaraan. Ridhoh et al. (2026) memberikan perspektif mengenai peran Pancasila sebagai ideologi moderat dalam menghadapi pertentangan identitas. Literatur tersebut telah menyediakan dasar konseptual dan empiris yang relevan, tetapi masing-masing memiliki penekanan pembahasan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menyintesis hubungan antara dimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam satu kerangka analisis mengenai peran nilai Persatuan Indonesia. Kebutuhan sintesis tersebut menjadi dasar kesenjangan kajian yang akan ditelaah lebih lanjut, bukan klaim bahwa penelitian terdahulu sama sekali belum membahas hubungan antardimensi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai Persatuan Indonesia dalam mencegah disintegrasi bangsa melalui kajian literatur yang mencakup perspektif politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini berfokus pada tiga persoalan utama, yaitu bagaimana nilai persatuan berperan dalam menghadapi polarisasi dan konflik politik, bagaimana prinsip keadilan ekonomi mendukung integrasi nasional, serta bagaimana toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman memperkuat hubungan sosial masyarakat. Melalui sintesis hasil penelitian terdahulu, kajian ini diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai keterkaitan ketiga bidang tersebut sekaligus mengidentifikasi strategi penguatan nilai persatuan yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menempatkan persatuan nasional sebagai persoalan multidimensional yang berkaitan dengan tata kelola politik, distribusi keadilan ekonomi, dan hubungan sosial budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis peran nilai Persatuan Indonesia dalam mencegah disintegrasi bangsa dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, dan sumber publikasi ilmiah lainnya menggunakan kata kunci “Persatuan Indonesia”, “disintegrasi bangsa”, “integrasi nasional”, “Pancasila”, “polarisasi politik”, “ketimpangan ekonomi”, dan “keberagaman sosial budaya”. Penelitian memprioritaskan publikasi tahun 2020 sampai 2026, serta mempertimbangkan literatur sebelumnya yang memiliki relevansi teoretis dan historis. Pemilihan sumber mengacu pada kesesuaian topik, kredibilitas penerbit, kejelasan metodologi, dan relevansi temuan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis temuan penelitian terdahulu. Peneliti mengelompokkan literatur ke dalam tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya, kemudian menganalisis hubungan setiap aspek dengan penguatan nilai persatuan dan pencegahan disintegrasi bangsa. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan sintesis konseptual mengenai peran nilai Persatuan Indonesia dalam menjaga integrasi nasional berdasarkan bukti ilmiah yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Menjaga Integrasi Nasional

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia memiliki peran sebagai landasan ideologis dan normatif dalam menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat. Sila ketiga Pancasila mengandung prinsip kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, dan penghormatan terhadap perbedaan yang menjadi dasar hubungan antarwarga negara. Lukito et al. (2022) menjelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai faktor pemersatu yang memungkinkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya mempertahankan identitasnya dalam satu kesatuan kebangsaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persatuan nasional tidak terbentuk melalui penyeragaman masyarakat, melainkan melalui penerimaan terhadap keberagaman dan kesepakatan mengenai nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, nilai Persatuan Indonesia memiliki fungsi integratif karena memberikan landasan bersama bagi masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan tanpa mengabaikan identitas kelompok masing-masing.

Analisis terhadap literatur juga memperlihatkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa berkaitan dengan persoalan yang saling berhubungan antara bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ketegangan politik dapat berkembang menjadi konflik sosial ketika masyarakat membangun prasangka terhadap kelompok yang memiliki pilihan berbeda. Ketimpangan ekonomi dapat memperkuat ketidakpuasan apabila masyarakat memandang distribusi pembangunan sebagai bentuk ketidakadilan. Sementara itu, rendahnya toleransi terhadap keberagaman dapat memperbesar jarak sosial antarkelompok masyarakat. Hidir dan Nurdiyanti (2024) menekankan bahwa filosofi Pancasila mendukung pembentukan identitas nasional yang inklusif melalui penghargaan terhadap keberagaman budaya. Berdasarkan sintesis tersebut, nilai

persatuan memiliki relevansi dalam mencegah disintegrasi melalui pembentukan kesadaran kebangsaan, penguatan keadilan sosial, serta pengembangan hubungan masyarakat yang saling menghormati. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat menerjemahkan nilai persatuan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.

2. Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Bidang Politik

Hasil kajian pada aspek politik menunjukkan bahwa polarisasi politik dan persaingan identitas merupakan tantangan terhadap penguatan persatuan nasional. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan ketika masyarakat mengembangkan sikap eksklusif dan menolak legitimasi kelompok lain. Jati (2022) mengidentifikasi bahwa polarisasi masyarakat Indonesia pada periode 2014 sampai 2020 berkaitan dengan perubahan pola persaingan politik yang semakin menonjolkan identitas kandidat dan kelompok pendukung. Pemilihan Presiden 2014, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, dan Pemilihan Presiden 2019 menjadi konteks penting dalam perkembangan polarisasi yang dikaji dalam penelitian tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa persaingan politik dapat memengaruhi hubungan sosial masyarakat ketika perbedaan pilihan berkembang menjadi pertentangan identitas yang bersifat emosional.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, nilai Persatuan Indonesia dapat menjadi landasan etis untuk membangun budaya politik yang menghargai perbedaan pendapat dan mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip persatuan tidak mengharuskan seluruh masyarakat mendukung pandangan atau kebijakan politik yang sama. Sebaliknya, persatuan menuntut pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis. Pembahasan ini sejalan dengan temuan Diprose (2008) mengenai pelaksanaan desentralisasi di Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap dinamika konflik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat membantu mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem sebelumnya, tetapi persaingan memperoleh kekuasaan di tingkat lokal juga dapat meningkatkan ketegangan antarkelompok. Oleh karena itu, penerapan nilai persatuan memerlukan pengelolaan kompetisi politik yang adil, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat.

Temuan Fitriani et al. (2005) turut memperlihatkan bahwa perkembangan pemerintahan daerah setelah desentralisasi membawa perubahan terhadap struktur politik dan administrasi Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap representasi dan pengelolaan kepentingan daerah. Namun, aspirasi tersebut tetap memerlukan keseimbangan antara kewenangan daerah dan kepentingan nasional. Berdasarkan temuan ini, penguatan nilai Persatuan Indonesia dalam bidang politik dapat diarahkan melalui pendidikan demokrasi, pengembangan dialog antarkelompok, peningkatan transparansi pemerintahan, dan perlindungan hak seluruh warga negara. Pendekatan tersebut relevan karena integrasi nasional tidak hanya berkaitan dengan kesamaan identitas kebangsaan, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan kelembagaan negara.

3. Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Bidang Ekonomi

Hasil kajian literatur pada aspek ekonomi menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan dan persepsi ketidakadilan memiliki keterkaitan dengan dinamika politik serta dukungan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Muhtadi dan Warburton (2020) menemukan bahwa pandangan masyarakat Indonesia mengenai ketimpangan pendapatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh preferensi dan identitas politik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang menganggap ketimpangan sosial ekonomi sebagai kondisi yang tidak adil cenderung memiliki pandangan lebih negatif terhadap demokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi politik ketika masyarakat menilai sistem pemerintahan belum memenuhi harapan terhadap keadilan. Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa ketimpangan ekonomi secara langsung menyebabkan disintegrasi bangsa. Hubungan keduanya perlu dipahami melalui mekanisme persepsi ketidakadilan, kepercayaan terhadap institusi, dan respons masyarakat terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif Pancasila, nilai Persatuan Indonesia berkaitan dengan prinsip keadilan sosial karena hubungan kebangsaan yang harmonis membutuhkan kesempatan yang relatif setara bagi seluruh masyarakat. Nilai persatuan tidak dapat hanya diwujudkan melalui kegiatan simbolis atau penanaman nasionalisme, tetapi juga membutuhkan kebijakan ekonomi yang memperhatikan kepentingan berbagai kelompok sosial. Pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bentuk kebijakan yang dapat mendukung integrasi nasional. Ketika masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terdapat dasar yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan terhadap negara dan solidaritas antarkelompok. Sebaliknya, ketimpangan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi memperkuat persepsi bahwa manfaat pembangunan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai persatuan dalam bidang ekonomi perlu menghubungkan pertumbuhan dengan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan bersama dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Selain itu, pembangunan antardaerah perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi dan kondisi geografis agar masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih proporsional. Dalam konteks pencegahan disintegrasi, pemerataan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu persatuan, tetapi sebagai salah satu kondisi struktural yang dapat mengurangi ketidakpuasan dan memperkuat rasa keadilan. Dengan demikian, penerapan nilai Persatuan Indonesia membutuhkan keterpaduan antara solidaritas nasional dan kebijakan ekonomi yang inklusif.

4. Peran Nilai Persatuan Indonesia dalam Bidang Sosial Budaya

Hasil kajian dalam bidang sosial budaya menunjukkan bahwa toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penguatan identitas nasional merupakan unsur penting dalam menjaga hubungan antarkelompok masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang tercermin melalui perbedaan bahasa, adat

istiadat, agama, dan tradisi. Keberagaman tersebut tidak secara langsung menyebabkan perpecahan, tetapi dapat memunculkan ketegangan apabila masyarakat mengembangkan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Hedir dan Nurdianti (2024) menjelaskan bahwa nilai filosofis Pancasila memiliki kontribusi terhadap pembentukan kesadaran identitas sosial dan nasional. Kajian tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar untuk menghubungkan berbagai identitas budaya dalam suatu kerangka kebangsaan yang inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia dapat berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial yang menghormati perbedaan tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing kelompok.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan pemahaman dan perilaku yang mendukung persatuan nasional. Dwintari dan Murdiono (2023) menemukan bahwa integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran kewarganegaraan pada sekolah inklusif dapat dilakukan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar, dan evaluasi. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai pendekatan pembelajaran, termasuk pengembangan empati, penghargaan terhadap perilaku toleran, serta penggunaan kelompok belajar yang heterogen. Temuan ini memberikan dasar empiris bahwa pendidikan nilai membutuhkan pengalaman interaksi sosial dan pembiasaan perilaku, bukan hanya penyampaian konsep secara teoritis. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan serupa dapat diterapkan melalui kegiatan kolaboratif antarsiswa, dialog lintas budaya, dan penyelesaian persoalan bersama yang melibatkan individu dengan latar belakang berbeda.

Berdasarkan sintesis literatur, penguatan persatuan dalam bidang sosial budaya perlu menggabungkan pendidikan nilai, interaksi antarkelompok, dan penghormatan terhadap hak budaya masyarakat. Nilai persatuan dapat berkembang melalui pengalaman sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami pandangan dan kebutuhan kelompok lain. Pendidikan multikultural memiliki relevansi dalam proses tersebut karena menempatkan keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial yang perlu dipahami secara kritis. Masyarakat juga perlu membedakan antara perbedaan budaya yang merupakan hak setiap kelompok dan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara. Dengan demikian, pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas nasional tidak harus dipandang sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersamaan ketika masyarakat mengakui bahwa identitas nasional Indonesia mencakup berbagai identitas budaya yang memiliki kedudukan setara.

5. Strategi Penguatan Nilai Persatuan Indonesia dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa

Hasil sintesis terhadap ketiga bidang menunjukkan bahwa pencegahan disintegrasi bangsa membutuhkan pendekatan yang saling berhubungan antara pengelolaan politik, pembangunan ekonomi, dan penguatan hubungan sosial budaya. Dalam bidang politik, nilai persatuan berfungsi sebagai landasan untuk mengelola perbedaan kepentingan melalui mekanisme demokrasi dan penyelesaian konflik. Dalam bidang ekonomi, nilai persatuan berkaitan dengan pembangunan inklusif dan pemerataan kesempatan yang dapat memperkuat persepsi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam bidang sosial budaya, nilai persatuan berperan dalam

membangun toleransi, solidaritas, serta penghargaan terhadap identitas kelompok yang beragam. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik karena ketidakadilan ekonomi dapat memengaruhi kepercayaan politik, sedangkan konflik politik dapat memperburuk hubungan sosial antarkelompok.

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Literatur Berdasarkan Perspektif Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Aspek	Temuan utama literatur	Implikasi penguatan persatuan
Politik	Polarisasi identitas dan kompetisi kekuasaan dapat meningkatkan ketegangan sosial (Jati, 2022; Diprose, 2008).	Dialog demokratis, perlindungan hak politik, dan penyelesaian konflik secara adil.
Ekonomi	Persepsi ketimpangan berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap demokrasi (Muhtadi & Warburton, 2020).	Pemerataan kesempatan ekonomi, pembangunan inklusif, dan peningkatan keadilan sosial.
Sosial budaya	Toleransi dan identitas nasional yang inklusif mendukung hubungan sosial dalam masyarakat majemuk (Hedir & Nurdianti, 2024; Dwintari & Murdiono, 2023).	Pendidikan multikultural, penguatan toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur yang dikaji. Tabel ini merupakan hasil analisis konseptual, bukan hasil pengukuran statistik atau survei.

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Persatuan Indonesia dapat dipahami sebagai prinsip yang menghubungkan berbagai upaya mempertahankan integrasi nasional. Akan tetapi, penerapan nilai persatuan memerlukan strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik persoalan pada setiap bidang. Ketegangan politik membutuhkan pengelolaan perbedaan pendapat dan perlindungan terhadap hak demokratis. Ketimpangan ekonomi membutuhkan perbaikan kebijakan distribusi kesempatan dan pelayanan publik. Sementara itu, konflik sosial budaya membutuhkan pengembangan toleransi, dialog, dan pengakuan terhadap identitas masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan satu pendekatan untuk mengatasi seluruh persoalan disintegrasi tidak memadai karena setiap bidang memiliki mekanisme dan penyebab yang berbeda.

Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai persatuan perlu diarahkan pada pembentukan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Pengetahuan kewarganegaraan membantu individu memahami hak, kewajiban, dan prinsip konstitusional. Sikap kewarganegaraan membentuk penghormatan terhadap perbedaan dan kesediaan untuk bekerja sama. Sementara itu, keterampilan kewarganegaraan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam dialog, mengambil keputusan bersama, dan menyelesaikan konflik secara damai. Ketiga kompetensi tersebut perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar nilai persatuan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi tercermin dalam tindakan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

6. Pembahasan Integratif dan Implikasi Penelitian

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa nilai Persatuan Indonesia memiliki relevansi dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, dan pengembangan solidaritas sosial. Ketiga mekanisme tersebut saling mendukung, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan akan kebijakan publik yang adil dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Persatuan nasional yang berkelanjutan memerlukan

kesesuaian antara nilai yang diajarkan kepada masyarakat dan praktik kelembagaan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian Jati (2022) mengenai polarisasi politik, Muhtadi dan Warburton (2020) mengenai persepsi ketimpangan, serta Dwintari dan Murdiono (2023) mengenai pendidikan toleransi menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional memiliki dimensi yang berbeda namun saling berhubungan. Polarisasi politik dapat memperkuat batas identitas antarkelompok, persepsi ketidakadilan dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem demokrasi, sedangkan pendidikan toleransi menyediakan pendekatan untuk membentuk sikap saling menghormati. Dengan menghubungkan ketiga hasil penelitian tersebut, kajian ini mengembangkan argumentasi bahwa pencegahan disintegrasi tidak cukup dilakukan melalui penguatan nasionalisme secara simbolis. Upaya tersebut perlu disertai tata kelola politik yang inklusif, kebijakan ekonomi yang berkeadilan, dan pendidikan sosial budaya yang menghargai kemajemukan.

Kontribusi kajian ini terletak pada penyusunan kerangka pemahaman multidimensional mengenai peran nilai Persatuan Indonesia. Penelitian terdahulu memberikan bukti dalam konteks dan bidang kajian masing-masing, sedangkan pembahasan ini mengintegrasikan temuan tersebut untuk menjelaskan keterkaitan antara stabilitas politik, keadilan ekonomi, dan harmoni sosial budaya. Meskipun demikian, kajian literatur ini belum dapat memastikan hubungan sebab akibat maupun mengukur besarnya pengaruh nilai persatuan terhadap penurunan risiko disintegrasi. Untuk menguji hubungan tersebut secara empiris, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan indikator yang mencakup toleransi sosial, kepercayaan terhadap institusi, persepsi keadilan ekonomi, dan identitas nasional.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa nilai Persatuan Indonesia bukan sekadar simbol ideologis, melainkan prinsip normatif yang dapat menjadi dasar penyusunan strategi integrasi nasional. Dalam bidang politik, persatuan membutuhkan praktik demokrasi yang menghormati perbedaan. Dalam bidang ekonomi, persatuan memerlukan perhatian terhadap pemerataan dan keadilan. Dalam bidang sosial budaya, persatuan membutuhkan toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman. Keterpaduan ketiga aspek tersebut memberikan dasar konseptual bagi upaya pencegahan disintegrasi bangsa yang lebih menyeluruh dan relevan dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, nilai Persatuan Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah disintegrasi bangsa melalui penguatan integrasi nasional pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik, nilai persatuan mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, serta penyelesaian konflik secara damai. Dalam bidang ekonomi, penerapan nilai persatuan berkaitan dengan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial. Sementara itu, dalam bidang sosial budaya, nilai persatuan memperkuat toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. Hasil

kajian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung persatuan dan stabilitas kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pencegahan disintegrasi bangsa membutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten melalui kebijakan pemerintah yang berkeadilan, pendidikan kewarganegaraan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai Persatuan Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menjaga integrasi nasional di tengah dinamika politik, ketimpangan ekonomi, dan perubahan sosial budaya.

Refrensi

- [1] Arifin, H. (2024). Politik hukum pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 48–57. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.426>
- [2] Budimanta, A. (2024). Struktur ekonomi Pancasila (Pancasilanomics). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(X), 1–27. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.522>
- [3] Diprose, R. (2008). Passing on the challenges or prescribing better management of diversity? Decentralisation, power sharing and conflict dynamics in Central Sulawesi, Indonesia. *Conflict, Security & Development*, 8(4), 393–425. <https://doi.org/10.1080/14678800802539291>
- [4] Dwintari, J. W., & Murdiono, M. (2023). The strategy of integrating tolerance values into civics learning in inclusive school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 214–222. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.42158>
- [5] Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>
- [6] Hedir, M. K., & Nurdianti, A. (2024). Cultural diversity in Pancasila philosophy: A contribution for social and national identity awareness. *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*. <https://doi.org/10.33592/pelita.v24i2.6276>
- [7] Huda, Q., & Aji, P. B. (2026). Strengthening national identity in the era of globalization and AI toward Golden Indonesia 2045. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(2), 212–230. <https://doi.org/10.52738/pjk.v6i2.894>
- [8] Istania, R. (2021). How do ethnic groups compete for a new province in a decentralised Indonesia? *Asian Journal of Political Science*, 29(3), 316–337. <https://doi.org/10.1080/02185377.2021.1993944>
- [9] Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian society during 2014–2020: Causes and its impacts toward democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2). <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>
- [10] Karimi, S. (2024). Sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial, dan neoliberalisme global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(X), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.526>
- [11] Lukito, W. S., Permana, A., & Prasetyo, A. (2022). Pancasila and the recontextualization of Indonesia's state identity: International relations approach. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 179–195. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.122>
- [12] Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Inequality and democratic support in Indonesia. *Pacific Affairs*, 93(1), 31–58. <https://doi.org/10.5509/202093131>

- [13] Ridhoh, M. Y., Haris, H., & Hasni. (2026). Pancasila as a moderate ideology: Mitigating and navigating identity clashes. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(1), 75–88. <https://doi.org/10.52738/pjk.v6i1.792>
- [14] Sugiyanto, F. X. (2024). Keadilan sosial dan kebijakan usaha mikro dan kecil (UMK). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(X), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.521>
- [15] Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>